



RENCANA KERJA TAHUN 2019



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
MAKASSAR 2018**



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Bajiminas No. 12 Telp.873680 – 854726 Fax. (0411) 858779 Kotak Pos 1062
M A K A S S A R 9 0 1 2 6

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 523/ /SK/V/DKP

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :a.bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 maka dipandang perlu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dengan mengacu dokumen perencanaan RPJMD, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja (renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
 6. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil,
 7. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
 10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,
 12. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
19. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
20. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243),
21. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Sulawesi Selatan.
22. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023.
23. Peraturan Daerah No. Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.
24. Keputusan Gubernur No. 30 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang direvisi dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.

Pasal 2

Sistematika RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup



Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Juli 2019

KEPALA DINAS,


Ir. SULKAF S LATIEF, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 196304241989031010

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Setda Propinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Biro Pembangunan Setda Propinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi Sulawesi Selatan
6. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Propinsi Sulawesi Selatan
7. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “**Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019**” sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan KUA PPAS Tahun 2019.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Juli 2019

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. SULKAF S LATIEF, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 196304241989031010



DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
SK Penetapan	
A. KATA PENGANTAR	i
B. DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	30
3.3. Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	
BAB V PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 disusun sebagai langkah perjalanan dari awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat visi, misi dan tujuan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk lima tahun mendatang dengan mengacu pada sistem perencanaan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri 86 Tahun 2017 dan Sistem Pengelolaan Perikanan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).



Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 diarahkan sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah periode 2018-2023 dimana dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N
4. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
6. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil,
7. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,
12. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
19. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
20. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243),
21. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Sulawesi Selatan.
22. Peraturan Daerah No. 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.
23. Keputusan Gubernur No..... tentang Pengesahan Rencana Kerja OPD tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator



perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017 dan tahun berjalan tahun 2018, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahu berjalan meliputi :



- 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku



kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3. **Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, seperti pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, pencapaian SDGS, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah kemudian rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Kemudian penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya dan dituangkan pada tabel rencana program.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Menguraikan tentang Rencana Kerja dengan pendanaan yang sesuai

BAB V PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 dan tahun berjalan 2018, sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis masing-masing sasaran, program dan kegiatan dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD tahun 2017 dan tahun berjalan 2018.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengevaluasi tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun yang dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017 dan tahun berjalan 2018.

Tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 97.846.094.367,38, terbagi menjadi belanja tidak langsung Rp. 18.158.440.138,38 dan belanja langsung Rp. 79.687.654.229,- dengan 8 Program dan 225 Kegiatan sedangkan realisasi sebesar Rp. 74.228.979.393,-, dengan persentase realisasi sebesar 93,15 %.

Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 s/d 2018 adalah:



1. - Program Rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
 - Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
2. Program Wajib Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Program Pengembangan Perikanan Budidaya,
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Berikut adalah Tabel Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 s/d tahun 2018;



Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman indikator kinerja yang berorientasi pada program dan kegiatan.
- b. Belum optimalnya pencapaian target yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Belum memahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan.

Tabel berikut ini menunjukkan pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini (terlampir). Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



2.1.2. Implikasi Program Kegiatan terhadap capaian program Renstra

Evaluasi Capaian Renstra yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan;

Untuk mencapai sasaran diatas maka terdapat 2 strategi yaitu 1) peningkatan daya saing dan 2) ketersediaan bahan baku/pangan . Program kegiatan yang dominan terhadap pencapaian sasaran tersebut yaitu program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Indikator kinerja utama yang terkait dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan adalah seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
IKU terkait Peningkatan produksi perikanan dan produktivitas perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Semester I 2018
1	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah kontribusi PDRB sektor perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan	%	8,40	8,30	8,60	9,56
		Produksi Perikanan	Ton	4.145.760	4.262.554,4	4.906.672,7	1.863.707,4
		a. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	ton	304.103,6	359.770,1	307.144,7	158.291,6
		b. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	ton	3.841.657	3.902.784,3	4.599.528	1.705.415,8
		Produksi Garam	ton	166.290	39.259,9	177.887	271,96
		Produksi Komoditi Unggulan					
		a. Jumlah produksi Udang (ton)	ton	44.369	45.341,9	47.615	23.636,8
		b. Jumlah produksi Bandeng (ton)	ton	192.660	170.135,9	240.780	96.309,7
		c. Jumlah produksi Rumput Laut (ton)	ton	3.576.443	3.662.970,5	4.280.366	1.573.390,9
		Konsumsi Ikan					
		Jumlah konsumsi ikan (kap/th)	Kg/kap/th	46,1	55,2	46,5	
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya					
		a. Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (pertahun)	%	103,8	107,57	104,1	107,01
		b. Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya (pertahun)	%	108,3	97,96	108,5	100,59

Ket : * Data Sementara



Pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan melaju secara perlahan seiring dengan meningkatnya produksi perikanan. Sub sektor perikanan ini terus ditumbuh kembangkan dengan sasaran pembangunan diantaranya; konsumsi ikan dalam negeri, memperoleh devisa dengan cara ekspor hasil tangkapan, menyediakan bahan baku perikanan, kesejahteraan nelayan dan menyerap tenaga kerja.

Peranan sektor perikanan cukup penting dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 35,0% terhadap PDRB Pertanian, kehutanan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dari target sebesar 38,87 % dengan nilai rupiah sebesar Rp. 88,31 Trilyun, kemudian target tahun 2018 sebesar 41,94 % dengan realisasi capaian sampai triwulan II tahun 2017 sebesar 36,9 % (*Data masih sementara*) atau dengan kontribusi nilai Rp. 95,89 Trilyun. Sedangkan Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sektor perikanan sebesar 8,2% dengan nilai rupiah sebesar Rp. 30,95 Trilyun, kemudian tahun 2018 sebesar 8,3 % (*Data masih sementara*) atau dengan kontribusi nilai Rp. 34,9 Trilyun. Sektor perikanan merupakan pemberi kontribusi ketiga pada sektor pertanian, setelah sub sektor tanaman bahan makan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya serta kehutanan.

Berkembangnya sub sektor ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah dimana pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat mendukung peningkatan PDRB Sulawesi Selatan sehingga secara tidak langsung akan menaikkan kesejahteraan yang tercermin dari pendapatan rumah tangga perikanan pertahun. Dengan bertambahnya sarana dan prasarana perikanan, maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan dan nilai produksi perikanan, sehingga dari semua sektor, perikanan harus menjadi sektor unggulan untuk jangka waktu pendek, menengah maupun panjang.

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa perkembangan produksi perikanan pada tahun 2017 telah melampaui target yaitu dari target 4.145.760,60 ton dan realisasi sebanyak 4.262.554,40 ton, dan diharapkan pada tahun 2018 dengan target produksi sebesar 4.906.672,70 ton dan sampai realisasi triwulan II telah mencapai 1.037.098,49 ton (*Data sangat sementara*) diharapkan produksi dapat melaju dengan cepat hingga sampai triwulan IV.



b. Tercukupinya infrastruktur dasar pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Pada tahun 2017 telah diupayakan perbaikan sarana dan prasarana di daerah-daerah pesisir dalam rangka mendukung peningkatan produksi, sehingga kemajuan akses masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir terhadap pembangunan dapat berkembang lebih baik. Perbaikan-perbaikan meliputi dermaga, pos pengawas, ekonomi produktif, air bersih dan listrik. Pada tahun 2017 ditargetkan 6 pulau yang akan mendapatkan pemberdayaan dan layanan infrastruktur dan telah terealisasi 100% sampai akhir anggaran tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 ditargetkan dapat menjangkau 8 pulau dan sampai triwulan II telah dilaksanakan sebesar 30 %. Begitu strategis dan tingginya potensi bahari yang dimiliki Sulawesi Selatan, menjadi hal penting bagaimana daerah ini dapat memberdayakan desa pesisir yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Tabel 2.2
IKU terkait Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Semester I 2018
2	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapat layanan infrastruktur	pulau	10	10	12	-

Dari beberapa kabupaten/kota yang telah memiliki pulau dan desa pesisir rata-rata tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kegiatan identifikasi desa terpencil, tertinggal dan pulau-pulau kecil diharapkan dapat mendata kawasan kawasan tersebut secara rinci yang ditampilkan dalam urutan prioritas yang mengutamakan kawasan yang perlu segera ditangani, melalui pendekatan dan batasan daerah pada hirarki Kabupaten.

c. Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan identifikasi potensi sumber daya wilayah



pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, identifikasi kawasan konservasi laut, pembudidayaan *mangrove fisheries*, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum dalam tindak pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tabel 2.3

IKU terkait peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Semester I 2018
3	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	115.571	95.241	122.728	95.752,12
		Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	Kasus	2	2	2	2
		Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	Kelompok	150	150	160	173

Tahun 2017 telah dilakukan identifikasi kawasan pesisir dan pembudidayaan mangrove dengan target sebesar 101.428,30 Ha dan dapat terealisasi sebesar 93,9 % . Diharapkan pada tahun 2018 dengan target 104.470,84 Ha sampai pada triwulan II telah terealisasi sebesar 25 %.Kemudian penyelesaian kasus dan penyidikan tindak pidana perikanan pada tahun 2017 dengan target 2 kasus dan telah dapat direalisasikan >100% pada akhir tahun anggaran 2017. Diharapkan pada tahun 2018 dengan target sebesar 2 kasus dan sampai triwulan II realisasi telah mencapai 60 %. Agar pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat menurun maka telah dibentuk kelompok masyarakat pengawas untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan sumberdaya laut pada tahun 2018 ditargetkan telah dibentuk 140 kelompok dan teralisasi sebanyak 150 kelompok dan diharapkan tahun 2018 dengan target 173 kelompok hingga sampai triwulan II telah mencapai 88 %.

d. Meningkatkan akses pangsa pasar dan iklim investasi yang berkualitas

Dalam rangka mendorong akses pasar dan iklim investasi di provinsi Sulawesi Selatan pada sektor kelautan dan perikanan maka telah dilaksanakan upaya



pembinaan dan pengembangan usaha yang berdaya saing melalui program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan dengan indikator kinerja adalah jumlah ekspor dan nilai ekspor produk perikanan. Tahun 2017 telah dicapai volume ekspor sebanyak ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 244 juta.

Tabel 2.4

IKU terkait Meningkatnya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Capaian Semester I 2018
3	Meningkatnya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Jumlah Ekspor Hasil Perikanan	ton	157.119	126.245	164.945	55.396
		Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US\$ 1.000	342.930	2.518	353.427	133.334

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran dan evaluasi Renja serta analisis masing-masing sasaran, program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4.



RENCANA KERJA TAHUN 2019

TABEL 2.5
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA JANGKA PENDEK TAHUN 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA		REALISASI		Kelompok Sasaran
					2017	2018	2017	2018 Semester I	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Kualitas Kemakmuran Ekonomi (penguatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial)	1 Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan	1 Volume produksi Perikanan budidaya (ton)	1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.841.657	4.599.528	3.902.784,3	1.705.415,8	Masyarakat Pembudidaya
			2 Nilai Produksi Perikanan budidaya (Rp.M)						
			3 NTPi		108,3	108,5	97,96	100,59	
			1 Volume produksi Perikanan Tangkap (ton)	2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	304.103,6	307.144,7	359.770,1	158.291,6	Masyarakat Nelayan
			2 Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)						
			3 NTN		103,8	104,1	107,57	107,01	
			1 Volume produksi garam rakyat (ton)	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan	166.290	177.887	39.259,9	271,96	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
2	Tercukupinya akses dan kualitas layanan infrastruktur	2 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.	2 Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur (pulau)	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10	12	10	-	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	3 Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber-daya kelautan dan perikanan	1 Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan	115.571	122.728	95.241	95.752,12	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
			2 Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)	2 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2	2	2	-	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil



RENCANA KERJA TAHUN 2019

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	TARGET KINERJA		REALISASI		Kelompok Sasaran
							2017	2018	2017	2018 Semester I	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>		<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
				3	Jumlah Pokmaswas yg berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)		150	160	150	182	
4	Terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	4	Meningkatnya iklim investasi ber-kualitas yg mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	1	Volume ekspor hasil perikanan (ton)	1 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	157.119	164.945	126.245	55.396	Unit Pengolahan Ikan skala kecil dan menengah
				2	Nilai ekspor hasil perikanan (US\$.1000/ thn)		342.930	353.427	2.518	133.334	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan mengacu pada SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010) , a. Penguatan cadangan pangan (80% pada tahun 2017); Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2018); c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (100% pada tahun 2018); d. Penanganan daerah rawan pangan (100% pada tahun 2018). Sehingga ditetapkan pelayanan dan penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2018 mempunyai komitmen kinerja yaitu :

1. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 119 unit
2. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 27 unit
3. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1 unit pengolahan ikan.
4. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor induk udang vannamee dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 4 unit dengan jumlah impor induk udang sebanyak 16.000 pasang induk dan ikan koi/mas/koki 15.000 ekor.
5. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 4.797 unit .
6. Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 2.151 unit
7. Produksi Benih Ikan Air Tawar sebanyak 5.304.000 Ekor berukuran 1-3 cm dengan perincian ikan mas : 3.902.500 ekor dan ikan nila : 1.401.500 ekor.
8. Produksi Benur sebanyak 2.936.200 Ekor dengan jenis vannamee sebanyak 1.215.000 ekor dan jenis windu sebanyak 1.585.200 ekor.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



RENCANA KERJA TAHUN 2019

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
I	PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	a . Persentase peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor, tata usaha, rumah tangga, adminstrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan	12 bulan	Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan kelengkapan sarana dan prasarana kantor dinas dan UPTD dinas	100%	100%	100%	100%	99.54%	50.00%	100%	-	
			Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100.00%	50.00%	100%	-	
2	a . Persentase kualitas SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dan layanan adm. Kepegawaian	12 bulan	Meningkatnya jumlah layanan peningkatan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100.00%	57.60%	100%	-	



RENCANA KERJA TAHUN 2019

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
4	a. Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan (pulau)	-	Meningkatnya pengetahuan tentang kawasan konservasi terhadap sumberdaya kelautan	4 pulau	6 pulau	8 pulau	10 pulau	6 pulau	8 Pulau	10 pulau	-	
	b. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (%)		Meningkatnya pengetahuan tentang kewirausahaan masyarakat pesisir	10%	10%	20%	20%	10%	-	20%	-	
	c. Volume produksi garam rakyat (ton)		Meningkatnya produksi garam	142.946	154.593	166.240	Revisi	115.126	13.988,6	166,240	Revisi	
5	a. Cakupan kasus illegal fishing dan penggunaan bahan yang merusak sumberdaya KP		Rasio Menu-runnya tingkat kerusakan Sumberdaya KP	33%	33%	33%	-	67%	-	33%	-	
	b. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan penga-wasan SD Kelautan dan Perikanan		Meningkatnya kelompok pengawas	120 kelompok	130 kelompok	140 kelompok	150 kelompok	131 kelompok	150 kelompok	155 kelompok	-	



RENCANA KERJA TAHUN 2019

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
6	a. Volume produksi perikanan budidaya (ton)		Meningkatnya produksi dan nilai perikanan budidaya	3.051.023	3.216.206	3.841.657	4.599.528	3,075,498	3,476,544	3,216,206	3,841,657	
	b. Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.T)			8,21	8,79	9,26	11,06	8,84	9,18	9,26	11,06	
	c. Jumlah tenaga pembudidaya			324,629	363,584	407,214	456,080	292,892	292.823	407,214	456,080	
	d. Nilai Tukar pembudidaya			107,9	108,2	108,3	108,5	106,47	102,08	108,2	108,3	
7	a. Volume produksi perikanan tangkap (ton)		Meningkatnya produksi dan nilai perikanan tangkap	298,112	301,093	304,104	307,145	310,290	312.3808	313.250	313.700	
	b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.T)			4,43	4,48	4,52	4,56	6,60	6.41	6,48	6,52	
	c. Jumlah nelayan			116,870	117,967	119,074	120,191	119,608	155.215	117,967	119,074	
	d. Jumlah nelayan perairan umum			14,326	14,541	14,759	14,980	16,666	12.080	14,541	14,759	
	e. Nilai Tukar nelayan			103,3	103,6	103,8	103,8	107,14	103,5	103,6	103,8	
8	a. Volume ekspor hasil perikanan (ton)		Meningkatnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan	142,566	149,665	157,119	164.945	139,602	164.945	149,665	157,119	
	b. Nilai ekspor perikanan (US\$.1000)			311,160	326,660	342,930	353.427	244,660	210.317,6	326,660	342,930	
	c. Jumlah tenaga pengolah			48,121	58,121	68,121	68,131	47,475	58.709	58,721	67,181	
	d. Jumlah tenaga pemasar			326,285	366,610	406,378	514.5368	332,748	392.819	506,378	512,118	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Catatan Strategis

2.3.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- a. Perbaiki sistem dan manajemen kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada operasional kegiatan prioritas, penyelesaian administrasi, koordinasi dan sinergi program kegiatan antara Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan, Cabang Dinas Kelautan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan melakukan penataan manajemen dan NSPK menyesuaikan UU No. 23 tahun 2014.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah yang berstatus P3D sehingga masih sulit memproyeksi untuk perencanaan dan sumber penerimaan PAD.
- c. Produksi perikanan penangkapan mengalami peningkatan namun jumlah RTP nelayan menurun.
- d. Bergesernya pendaratan kapal ikan ke tempat pendaratan kapal ikan yang lebih memadai yang terletak di luar provinsi Sulawesi Selatan sehingga data produksi perikanan tangkap tidak terlalu besar peningkatannya. Untuk itu dilakukan dukungan dalam akses penguatan usaha dan kelembagaan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan dan budidaya, pengembangan motorisasi kapal-kapal perikanan yang dipercepat pelaksanaannya (melalui usaha bersama), percepatan P3D sehingga pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan yang berlokasi di kabupaten/kota serta peningkatan kapasitas SDM pembudidaya dan nelayan melalui koordinasi dan pembinaan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014.
- e. Kondisi fisik sarana produksi dan infrastruktur masih kurang memadai dari hulu ke hilir seperti penanganan hasil tangkapan ikan dan budidaya belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mutu produksi masih rendah.
- f. Tata niaga dan pemasaran hasil produksi yang belum maksimal
- g. Sarana pelabuhan perikanan Nusantara belum berfungsi sebagai sarana bongkar muat sehingga distribusi hasil dan nilai produksi perikanan tidak masuk dalam siklus perekonomian di Sulawesi Selatan
- h. Pemasaran didominasi oleh pedagang pengumpul sebagai pemasok pada pihak pabrikan sehingga tidak memperhatikan mutu yang menyebabkan harga sangat murah di pihak pembudidaya dan nelayan.



- i. Degradasi lingkungan pesisir dan lautan, perubahan iklim dan factor cuaca yang cukup ekstrim sehingga mempengaruhi produksi perikanan dan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya.

2.3.2. Rekomendasi dan Catatan Strategis

1. Diharapkan adanya koordinasi yang baik antara stakeholder yang terkait dengan tetap berpedoman pada perencanaan dan regulasi yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan produk Hilirisasi dengan pengembangan sarana produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan infrastruktur dari hulu ke hilir dan perlunya akses penguatan usaha dan kelembagaan pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan penguatan infrastruktur
3. Dukungan dalam melaksanakan usaha penangkapan, pengembangan motorisasi kapal-kapal perikanan yang dipercepat pelaksanaannya (melalui usaha bersama), percepatan pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Untia Makassar dan pelabuhan-pelabuhan lainnya yang berlokasi di kabupaten/kota serta pelatihan/bimbingan teknis nelayan dengan percepatan gerak dan penyempurnaan kelengkapan sarana tangkap.
4. Penyempurnaan sarana produksi terutama pada tempat pelelangan ikan di pelabuhan seperti tersedianya air bersih, penyediaan alat bantu penanganan ikan, sistem rantai dingin, pabrik es, pembangunan lantai dan drainase, serta penanganan produk olahan sesuai standar mutu.
5. Peningkatan akses informasi pemasaran, penataan kelembagaan dalam akses tata niaga dan peningkatan pengawasan atas distribusi dan pemasaran produk perikanan yang berlangsung di laut, diatas kapal dan antar pulau.
6. Perlu meningkatkan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui dukungan program nasional yaitu Kartu KUSUKA, Asuransi Nelayan dan SEHAT nelayan dan pembudidaya serta Pengembangan Usaha Garam Rakyat terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakselerasi produksi dan daya saing produk perikanan seperti tenaga penyuluh spesialis, pembina mutu, ahli pembenihan dan tenaga teknis lainnya.
8. Dalam masa transisi penerapan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kab/kota yang memiliki program yang terkait dengan kewenangan provinsi sedapat mungkin dimodifikasi nomenklatur dengan memberi Kata MENDUKUNG (supporting) .



9. Integrasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan antar beberapa daerah yang memiliki jarak geografi dan ekologi yang berdekatan.
10. Pengembangan desain pulau mandiri yang mencakup aktivitas perikanan dan kelautan dari hulu sampai ke hilir.
11. Setiap usulan yang diajukan oleh Kab/Kota seperti Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Sarana dan Prasarana Budidaya Laut, dan Alat Pengolahan harus disertai dengan proposal dan Detail Engineering Desain dan ditujukan ke Gubernur.
12. Pengembangan sentra-sentra pembibitan dan sertifikasi bibit/benur komoditas unggulan seperti udang, rumput laut, bandeng dan ikan air tawar yang bernilai ekonomis.
13. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap yang ramah lingkungan dan food safety (keamanan pangan).
14. Pengembangan sentra-sentra pasca panen dan sertifikasi produk UMKM yang bebas bahan kimia berbahaya (formalin, boraks, dan jenis lainnya)
15. Peningkatan daya dukung lingkungan melalui penggunaan bahan-bahan organik dan sistem pengendalian pencemaran lingkungan (penerapan IPAL terutama pada tambak intensif dan supra intensif).
16. Dalam penerapan teknologi yang lebih maju, perlu membuat tambak percontohan di kabupaten/kota di lokasi yang strategis, sebagai sarana penyuluhan untuk pembudidaya dengan melibatkan penyuluh, tim ahli dan tim teknis.
17. Dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional untuk penurunan emisi karbon dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) maka perlu penguatan Blue Carbon dengan menyusun kegiatan ideal penurunan emisi karbon seperti rehabilitasi Mangrove dan Transplantasi Padang Lamun.
18. Pengembangan program mina wisata bagi kabupaten kota yang memiliki potensi sebagai upaya perluasan pasar produk kelautan dan perikanan
19. Pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan daya saing produk kelautan dan perikanan
20. Program, kegiatan dan anggaran yang diusulkan oleh kabupaten/kota akan diselaraskan dengan program, kegiatan dan anggaran provinsi dengan memperhatikan urgensi kebutuhan daerah.



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2019 maka berdasarkan RPJMD 2018-2023 diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yaitu :

Misi ke-5 Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup

- ❖ Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.
- ❖ Target Indikator Tujuan : PDRB Hijau
- ❖ Sasaran : Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam.
- ❖ Target Indikator Sasaran Tahun 2019 : Kontribusi PDRB Perikanan 8,6%

Sehingga berdasarkan Misi, tujuan dan capaian sasaran tersebut disusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan Misi satu juga turut menentukan keberhasilan Misi lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional.

Pada tahun 2019 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang



dianggap signifikan pengaruhnya. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2019 diarahkan pada:

- a. Untuk tahun 2019 fokus pada Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan** diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan, yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan dukungan investasi; **Optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.
- b. Bentuk amanah yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 untuk sektor Perikanan terdapat **program Prioritas yaitu Program Hilirisasi Perikanan dengan komoditas unggulan yaitu Udang Windu dan Rumput Laut dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomis**, dan mensinergikan keterkaitan dengan dokumen RPJMN nasional i telah dituangkan dalam agenda Nasional Nawacita ke dalam dokumen perencanaan. Untuk Keterkaitan tersebut dituangkan pada Nawacita ke 7 yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Berdasarkan Forum OPD terdapat beberapa usulan dari OPD Kabupaten/Kota sehingga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :



**Tabel .2.3 . USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Urusan/Bidang Urusan>Nama OPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rincian Usulan			Catatan Strategis	Validasi	
			Volume	Sasaran Kegiatan	Lokasi		Akomodir	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	
2.00	Urusan Pilihan							
2.0001	Kelautan dan Perikanan							
	Dinas Kelautan dan Perikanan							
A	PROGRAM HILIRISASI	Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi benih dan bibit Jumlah produksi kelompok pembudidaya Jumlah produksi kelompok nelayan Jumlah produksi perikanan tangkap						
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana prasarana perikanan budidaya yang disediakan	1 set	Bantuan Bibit Rumput Laut Cottoni untuk klp.Maega Dalle	Waetuo East Tanete Riattang Bone Regency (Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul

RENCANA KERJA TAHUN 2019



				Bantuan sarana produksi rumput laut Cottoni kec. Mattirosompe dan Kec. Duampanua	Pinrang Regency South Sulawesi ID ()		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
No	Urusan/Bidang Urusan>Nama OPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rincian Usulan	Catatan Strategis	Validasi	No	Urusan/Bidang Urusan>Nama OPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang disediakan	1 unit Pengadaan Kapal diatas 10 GT beserta lat tangkap dan mesin untuk KUB Buana Bahari 1 unit Pengadaan Rumpon Laut Dalam Klp. Nelayan Cari Hidup 1 Unit Pengadaan Rumpon Laut Dalam Klp. Jaya Butung 1 unit Pengadaan Rumpon Laut Dalam Klp. Nelayan Pasir Putih 2 Unit Pengadaan Kapal Penangkapan ikan lengkap dengan alat tangkap dan mesin diatas 5 GT	Waetuo East Tanete Riattang Bone Regency (Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur) Suppa Pinrang Regency South Sulawesi () Bonto Kamase Hero Lange-Lange Bulukumba Regency () Suppa Pinrang Regency South Sulawesi () Pinrang Regency South Sulawesi ID ()	untuk kapal 5 GT ke bawah tidak menjadi urusan kewenangan provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014, untuk pengadaan rumpon laut dalam harus memiliki ijin dan laporan produksi		Dapat diakomodir Dapat diakomodir Dapat diakomodir Dapat diakomodir Dapat diakomodir	- Proposal menyusul - Proposal menyusul - proposal menyusul --Proposal menyusul - Kec. Duampanua dan atau kec. Mattirosompe, Nama kelompok menyusul

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1 Unit	Pengadaan Rumpon Laut Dalam Klp. Abadi Jaya	Gunturu Hero Lange-Lange Bulukumba Regency ()	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			1 Unit	Pengadaan Rumpon Laut Dalam Klp. Nelayan Resky Rahmat	Lero Suppa Pinrang Regency ()	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			2 unit	Pengadaan Kapal diatas 5 GT beserta alat tangkap dan mesin klp. Al.-Amin dan Klp. Cinta Damai	Langa Langnga Mattirosompe ()	Dapat diakomodir	- menunggu Proposal
			1 unit	Pengadaan Bantuan Kapal Tangkap Pancing Tonda diatas 5 GT untuk Klp Bulu Kamase	Tongke-Tongke East Sinjai Sinjai Regency (Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)	Dapat diakomodir	- Sama yang diusulkan Dinas Perikanan Kab. Sinjai
			1 unit	Penyediaan Rumpon Laut Dalam untuk Kelompok Cahaya Pelangi	Lonrae East Tanete Riattang Bone Regency ()	Dapat diakomodir	- Proposal Menyusul
			1 unit	Pengadaan kapal tangkap 5 GTkelompok nelayan paku-paku	Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ()	Dapat diakomodir	- Proposal Menyusul
			120 unit (60 unit cool box 60 unit keranjang ikan)	Penyediaan Cool Box dan keranjang ikan untuk nelayan 6 kelompok yaitu klp. Nelayan Sinar Bahari, Klp. Putra Barombong, Klp. Baji Pamai, Klp. Batas Kota, Klp. Toddopulia, Klp. Ujung Kassi	Barombong Tamalate Makassar City ()	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1 unit	Bagang Perahu dan Alat Tangkap klp Malelaya Mandiri	North Polombangkeng Takalar Regency South Sulawesi ()		Tidak dapat diakomodir	- Dialihkan ke Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang , Proposal menyusul
			4 unit	Rumpon Laut Dalam Klp. Wage Kel. Rampoang	Palopo Wara Palopo City ()		Dapat diakomodir	- Dialihkan ke Kec. Bara, proposal menyusul
			1 unit	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan diatas 5 GT beserta alat tangkap dan mesin kelompok Laskar Pesisir	Lakawali Pantai Malili East Luwu Regency ()		Dapat diakomodir	- Proposal Menyusul
			1 Unit	Pengadaan Rumpon Laut Dalam Klp Doa bersama	Bonto Kamase Hero Lange-Lange Bulukumba Regency ()		Dapat diakomodir	- proposal menyusul
			1 unit	Rumpon laut dalam untuk klp. Sipakammase	Lanrisang Pinrang Regency South Sulawesi ()		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			2 unit	Pengadaan Kapal 5 GT Klp. sinar Galesong, Desa Galesong, Klp. Nelayan Harapanku Desa Galesong	Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Galesong)		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			1 Unit	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan diatas 5 GT alat tangkap dan mesin Klp Mekar Karang Desa Raja Kec. Bua	Malangke North Luwu Regency South Sulawesi (Desa Benteng Kecamatan Malangke Kab.Luwu Utara)		Dapat diakomodir	- proposal menyusul

RENCANA KERJA TAHUN 2019



3	Bantuan Benih/Bibit Perikanan hasil produksi UPTD	Jumlah benih/bibit ikan yang diserahkan ke masyarakat hasil produksi	800000 ekor nener dan 200000 ekor benur	pengadaan benih nener dan benur bagi kelompok tani: A).Sitto Kapasa,b).sitto tolorang,c).batu doang 1,d).batu doang 2.	Kapasa Tamalanrea Makassar City ()	Untuk paket bibit budidaya payau dan air tawar hanya dapat diakomodir jika merupakan bantuan bibit hasil produksi UPT Provinsi dan sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota sesuai UU 23 Tahun 2014	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
---	---	--	---	--	------------------------------------	--	------------------	---------------------

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1600000 ekor nener dan 400000 ekor benur	PENGADAAN BANTUAN BENIH BENUR DAN NENER UNTUK KELOMPOK TANI A).ANDALAN SEJAHTERA,B).ANDALAN SEJAHTERA 2,C).ANDALAN SEJAHTERA 3..D).SENGKABUNTING,E)PUMB ATTIK,F. TEKODONG 1, G.TEKODONG 2,H. WINDU SEJAHTERA	Parang Loe Tamalanrea Makassar City ()	Untuk paket bibit budidaya payau dan air tawar hanya dapat diakomodir jika merupakan bantuan bibit hasil produksi UPT Provinsi dan sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota sesuai UU 23 Tahun 2014	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			600000 ekor nener dan 150000 ekor benur	PENGADAAN BENIH BENUR DAN NENER UNTUK KELOMPOK A).KERA-KERA,B).BERKAH,C).TAMALANREA KERA-KERA	Tamalanrea Indah Tamalanrea Makassar City ()		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			400000 ekor nener dan 100000 ekor benur	PENGADAAN BENIH NENER DAN BENUR UNTUK KELOMPOK A).BANDENG BIRA,B)HATI MULIA,	Bira Tamalanrea Makassar City ()		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			50000 ekor benur dan 200000 ekor nener	bantuan bibit benur dan nener Klp. Mabbulo Sibatang Kampung Kalampang Desa Bone Kec. Segeri	Liukang Tangaya Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ()	Untuk paket bibit budidaya payau dan air tawar hanya dapat diakomodir jika merupakan bantuan bibit hasil produksi UPT Provinsi dan sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota sesuai UU 23 Tahun 2014	Dapat diakomodir	- Dialihkan ke Kec. Segeri Proposal menyusul
			150000 ekor nener	pengadaan bibit nener	Patobong Mattirosompe Pinrang Regency ()		Dapat diakomodir	- Kelompok calon penerima blm jelas (Menunggu konfirmasi)
			50000 ekor	Pengadaan Bibit Benur Udang Windu Pokdakan Nelayan Bulu	Mattirosompe Pinrang Regency South Sulawesi (Desa Mattiro tasi)		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			1000000 Ekor nener	Pengadaan Bibit Nener untuk kelompok Setia Bakti Desa Minasa Upa, Klp. Abbulo Sibatang Desa Minasa Upa	Bontoa Mandai Maros Regency ()		Dapat diakomodir	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			500000 ekor nener	Pengadaan Bibit Mener Klp. Gossea Kel. Soreang	Lau Maros Regency South Sulawesi ()	Dapat diakomodir	-
			1500000 ekor	Pengadaan Bibit Nener	Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi (Desa Pitue)	Dapat diakomodir	- Melengkapi Proposal
			500000 ekor	Pengadaan Bibit Nener Klp. Mallusetasi Kampung Cambang,	Segeri Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ()	Dapat diakomodir	- Melengkapi Proposal
			1 unit	Rumpon laut dalam Klp. Pamase Desa Lero	Lero Suppa Pinrang Regency ()	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			150000 ekor	Pengadaan bibit nener klp Reski Linoe Desa Paria, Klp. Belalang Kec. Bittoeng, Klp. Mappasitujue Desa Paria	Duampanua Pinrang Regency South Sulawesi ()	Dapat diakomodir	- Proposal Menyusul
			50000 ekor	Bantuan Bibit Udang Klp. Budidaya Ade Berkah	Waetuo East Tanete Riattang Bone Regency (Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone)	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			400000 ekor nener	Bantuan Bibit Nener untuk Kel. Sipakarajae Desa Pengkajoang dan Kel. Tani Mabarakka Desa Waetuo Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara	Pangkajoang Malangke Bar. Kabupaten Luwu Utara (Desa Pengkajoang dan Desa waetuo Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara)	Dapat diakomodir	- Proposal menyusul

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			20000 Ekor ikan Mas dan 60000 ekor ikan Nila	Bantuan Bibit/Benih Ikan Mas dan Nila yang tergabung dalam 4 kelompok di Kab. Luwu Kec. Bajo yaitu Klp. Kembang Bersama, Klp. Kalo Tangga, Klp. Tani Salurang, Klp. Tani Pangi	Bajo Luwu Regency South Sulawesi ()		Dapat diakomodir	- Proposal menyusul
			50000 ekor benur	Bantuan bibit Benur klp Lele Uwa Desa Wewang	Lakawali Pantai Malili East Luwu Regency ()		Dapat diakomodir	- Proposal Menyusul
			50000 ekor benur dan 200000 ekor nener	bantuan benih bibit benur dan nener Klp. Sipakainga	Bonto Bahari Bontoa Maros Regency (kelompok sipakainga)		Dapat diakomodir	Proposal menyusul
			5000 Ekor ikan Mas dan 15000 ekor ikan Nila	Bantuan Bibit Ikan Mas dan Nila Kelompok Bersatu	Panyangkalang Bajeng Gowa Regency ()		Dapat diakomodir	-Propsal Menyusul
			5000 Ekor ikan Mas dan 15000 ekor ikan nila	Bantuan Bibit Ikan Mas dan NilaKelompok Biring Tabing	Pabentengan Bajeng Gowa Regency ()		Dapat diakomodir	--Propsal Menyusul
			50000 ekor benur dan 200000 ekor nener	bantuan benih nener dan benur Klp. Parasangang Beru	Pajukukang Bontoa Maros Regency (kelompok parasangang biru)		Dapat diakomodir	Proposal menyusul
			5000 Ekor Ikan Mas dan 15000 ekor Nila	Bantuan Bibit Ikan Mas dan Nila Kelompok Rawa Indah	Maccini Baji Bajeng Gowa Regency ()		Dapat diakomodir	- Propsal Menyusul

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			50000 ekor benur dan 200000 ekor nener	bantuan benih nener dan benur Klp. Lalang tedong	Ampekale Bontoa Maros Regency (kelompok lalang tedong)		Dapat diakomodir	Proposal menyusul
			150000 Ekor	Bantuan Benih/Bibit Air Tawar jenis Nila Klp Karama desa Aeng BatuBatu	Takalar Regency South Sulawesi ID ()		Dapat diakomodir	-Proposal Menyusul
			5000 ekor ikan Mas dan 15000 ekor ikan Nila	Bantuan Bibit Ikan Mas dan Nila Kelompok Miranuang Desa gentungan	West Bajeng Gowa Regency South Sulawesi ()		Dapat diakomodir	- Proposal Menyusul
			30000 ekor	bibit ikan air tawar jenis nila Dan Lele klp Jeneberang Di Kel. Pangkabinanga dan Klp. Julukanaya Di Desa Julukanaya	Gowa Regency South Sulawesi ID ()		Dapat diakomodir	- Proposal Menyusul
			2000000 ekor	bibt ikan air tawar nila dan lele	Tana Toraja Regency South Sulawesi ID ()		Dapat diakomodir	- 20 kelompok dan akan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten
2.000101.0016	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Jumlah produksi garam rakyat						
		Cakupan pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya diberdayakan						
		Nilai ekspor produk KP						
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)						
		Nilai produksi perikanan tangkap						
		Konsumsi Ikan						
		Volume ekspor produk KP						

RENCANA KERJA TAHUN 2019



		Nilai Tukar pembudidaya (NTPi) Nilai Tukar Pengolah (NTP) Nilai produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Olahan konsumsi dan non konsumsi						
4	Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasar Produk KP	Jumlah sarana prasarana pengolahan dan pemasaran	10 Klp. ikan 60 unit	Pengadaan coldbox dan basket ikan Penyediaan sarana pengolahan abonikan untuk Klp. Baki Minasa, Klp Baji Gau, Klp Turungan Caddia, Klp. Turungan Lompoa, Klp Sengka Padada, Klp. Baji Ampe	Soppeng Regency South Sulawesi ID () Lakkang Tallo Makassar City ()		Dapat diakomodir Dapat diakomodir	Data calon kelompok penerima untuk dilengkapi - Proposal menyusul
2.000101.0017	PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali Cakupan bina kelompok masyarakat terhadap pengawasan Cakupan kasus ilegal fishing yang dapat diproses melalui jalur hukum Jumlah jenis ikan yang dilindungi dan dilestarikan Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Berkurangnya tindakan IUU Fishing						
5	Rehabilitasi Kawasan Pesisir Yang Rusak	Jumlah kawasan yang direhabilitasi	1 unit	rehabilitasi terumbu karang	Laikang Mangara Bombang Takalar Regency (pesisir desa laikang, kecamatan mangarabombang kabupaten takalar)		Dapat diakomodir	- Dibutuhkan luasan yang rusak dan titik koordinat

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1 unit	rehabilitasi terumbu karang	Galesong Takalar Regency South Sulawesi (perairan Galesong pulau sanrobengi, kabupaten Takalar)		Dapat diakomodir	- Dibutuhkan luasan yang rusak dan titik koordinat
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah sarana prasarana	50 Meter	Pembuatan Tambatan Perahu Desa Cimpu	Suli Luwu Regency South Sulawesi (Desa Cimpu, Cimpu Selatan Kab.Luwu)		Dapat diakomodir	-Proposal, DED, Keterangan Lokasi
			50 Meter	Pembuatan Tambatan Perahu Desa Ulo-Ulo	Belopa Luwu Regency South Sulawesi ()		Dapat diakomodir	- Ptrposal, DED, Keterangan Lokasi
			50 Meter	Pembuatan Tambatan Perahu Desa Batu Lotong	Larompong Luwu Regency South Sulawesi (Kec. Larompong Ling.Batu Lotong Kab. Luwu)		Dapat diakomodir	- Proposal, DED, Keterangan Lokasi
7	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan yang telah diperbaiki dan terpelihara	50 Meter	Tambatan perahu	Suli Luwu Regency South Sulawesi ()	judul kegiatan direvi menjadi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Dapat diakomodir	- Perlu Data Dukung DED dan BLKP



**Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan>Nama OPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rincian Usulan				Perangkat Daerah Terkait	Validasi	
			Volume	Lokasi	Pengusul			Akomodir	Keterangan
					Nama	Dapil			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
2.000801.0001	PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)							
2.000801.0001003	Inovasi Teknologi pengembangan budidaya Rumput Laut	Jumlah pengembangan budidaya Rumput Laut	20 unit	Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi (Desa Borongtala (pokdakan batu putih dan pokdakan kuda laut))	Dr. H. Alimuddin, SH, MH, M.Kn	Dapil IV	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
			10 unit	Binamu Jeneponto Regency South Sulawesi (Kel. Pabiringa (pokdakan bintang laut))	Dr. H. Alimuddin, SH, MH, M.Kn	Dapil IV		Ya	-
			1 unit	Binamu Jeneponto Regency South Sulawesi ()	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX		Ya	-
			5 unit	Pasir Putih Bola Wajo Regency ()	Ir. Selle K.S. Dalle	Dapil VIII		Ya	-
			1 unit	East Wara Palopo City South Sulawesi (Kecamatan Wara Timur)	Drs. H. Marjono	Dapil XI		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			20 unit	Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi (Desa Tino (pokdakan Paccinongan), Desa Bonto Ujung (pokdakan bonto kamase))	Dr. H. Alimuddin, SH, MH, M.Kn	Dapil IV		Ya	-
			1 unit	Gantarang Bulukumba Regency South Sulawesi ()	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX		Ya	-
			5 unit	Botto Takkalalla Wajo Regency ()	Ir. Selle K.S. Dalle	Dapil VIII		Ya	-
			1 unit	Bontosunggu Tamalatea Jeneponto Regency (desa bonto sunggu kec tamalate kag jeneponto)	Asrul Makkaras Sujiman	Dapil III		Ya	-
			1 unit	Ujung Loe Bulukumba Regency South Sulawesi ()	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX		Ya	-
			50000 kg	Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi (kec. sanrobone)	H. Hengki Yasin, S.Sos	Dapil III		Ya	-
			10 unit	Pattangngae Bola Wajo Regency ()	Ir. Selle K.S. Dalle	Dapil VIII		Ya	-
			50000 kg	Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi (kec. mangarabombang)	H. Hengki Yasin, S.Sos	Dapil III		Ya	-
			1 unit	Wewang Riu Malili East Luwu Regency (Desa Wewang Riu Kec. Malili, Kab Luwu Timur)	H. Abd. Hafid Pasiangan, SE	Dapil XI		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			5 unit	East Pantai Takkalalla Wajo Regency ()	Ir. Selle K.S. Dalle	Dapil VIII		Ya	-
			20 unit	Binamu Jeneponto Regency South Sulawesi (Kel. Pabiringa (pokdakan cahaya rezky, dan pokdakan laut biru))	Dr. H. Alimuddin, SH, MH, M.Kn	Dapil IV		Ya	-
2.000801.0001006	Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya	Jumlah inovasi teknologi usaha perikanan budidaya Komoditas Unggulan dan komoditas perikanan lainnya	20000 ekor	Duampanua Pinrang Regency South Sulawesi ()	H. Andi Jamaluddin Jafar, SE, MM	Dapil IX	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
			10 unit	Tello Baru Panakkukang Makassar City ()	H. Syahrudin Alrif, S.IP	Dapil IX		Ya	-
			1 unit	Bulukumba Regency South Sulawesi ID (UPT Wilayah Selatan Bulukumba)	Muhammad Taslim Tamang, A.Md	Dapil VII		Ya	-Kegiatan ini fokus Bantuan Benur Udang
			1 unit	Barra Regency South Sulawesi ID (CDK Wilayah Selatan)	Muhammad Taslim Tamang, A.Md	Dapil VII		Ya	-
			0	Mattiro Tasi Mattirosompe Pinrang Regency (desa mattiro tasi kec mattiro sompe,desa waetuo kec lanrisang,desa ujung lero kec,suppa kab pinrang kab pinrang)	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Dapil IX		Ya	-
			100000 ekor	Makassar Makassar City South Sulawesi (kecamatan tamalanrea kelurahan bira)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			400000 ekor	Makassar Makassar City South Sulawesi (kecamatan tamalanrea kelurahan parangloe)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-
			600000 ekor	Makassar City South Sulawesi ID (kecamatan tamalanrea kelurahan tamalanrea indah)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-
			400000 ekor	Makassar Makassar City South Sulawesi (kecamatan tamalanrea kelurahan bira)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-
			1600000 ekor	Makassar Makassar City South Sulawesi (kecamatan tamalanrea kelurahan parangloe)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-
			200000 ekor	Makassar City South Sulawesi ID (kecamatan tamalanrea kelurahan kapasa)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-
			20000 ekor	Mattirosompe Pinrang Regency South Sulawesi ()	H. Andi Jamaluddin Jafar, SE, MM	Dapil IX		Ya	-
			20000 ekor	Lanrisang Pinrang Regency South Sulawesi ()	H. Andi Jamaluddin Jafar, SE, MM	Dapil IX		Ya	-
			100000 ekor	Wiringtasi Suppa Pinrang Regency (DESA WIRING TASI KEC,SUPPA KAB,PINRANG)	Ir. H. Nupri Basri	Dapil IX		Ya	-
			200000 ekor	(UPTD Perikanan Budidaya Payau dan laut)	A. M. Irwan Patawari, S.Si	Dapil V		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



2.000801. 0001007	Penyediaan dan Pembesaran Induk Unggul berkualitas pada budidaya payau dan laut	Jumlah induk unggul yang berkualitas yang tersedia dan dibesarkan	0	Coppo Barru Sub-District Barru Regency (kel,coppo kec barru kab,barru)	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Dapil IX	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	--- Usulan yang diinput dobel
			800000 ekor	Makassar City South Sulawesi ID (kecamatan tamalanrea kelurahan kapasa)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-
			150000 ekor	Makassar City South Sulawesi ID (kecamatan tamalanrea kelurahan tamalanrea indah)	Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, M.BA	Dapil II		Ya	-
			12 kelompok	Maros Regency South Sulawesi ID ()	Drs. Alexander Palinggi	Dapil II		Ya	-
			3 Kelompok	Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			7 Paket	North Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Galesong Utara)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			5 Paket	Mappakasunggu Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 unit	Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ID ()	Drs. Alexander Palinggi	Dapil II		Ya	- Lokasi dialihkan ke Kabupaten Gowa Kecamatan Bajeng

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			2 kelompok	Takalar Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			200000 ekor	(UPTD Perikanan Budidaya Payau dan Laut)	A. M. Irwan Patawari, S.Si	Dapil V		Ya	-
			5 kelompok	South Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			6 Kelompok	Galesong Takalar Regency South Sulawesi (kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			0	Hasanuddin Mandai Maros Regency (desa hasanuddin kec mandai kab maros)	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Dapil IX		Ya	-
			0	Coppo Barru Sub-District Barru Regency (kel,coppo kec barru kab,barru)	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Dapil IX		Ya	-
			0	Mattiro Tasi Mattirosompe Pinrang Regency (desa mattiro tasi kec mattiro sompe,desa waetuo kec lanrisang,desa ujung lero kec,suppa kab pinrang kab pinrang)	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Dapil IX		Ya	-
2.000801.0001009	Inovasi Teknologi pengembangan usaha Garam	Jumlah Inovasi Teknologi pengembangan usaha garam	5000 Meter	Takalar Regency South Sulawesi ID ()	Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag	Dapil I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



2.000801. 0001010	Pengelolaan saluran tambak garam	Jumlah panjang saluran tambak garam yang direhab/dibangun	100 m	Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ()	H. Ni matullah, SE, Ak	Dapil VI	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
			1 paket	Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ()	H. Ni matullah, SE, Ak	Dapil VI		Ya	-
2.000801. 0001012	Pembinaan Teknis Penanganan Hasil Tangkapan Ikan di Atas Kapal	Jumlah nelayan yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik diatas kapal	1 UNIT	Langnga Mattirosompe Pinrang Regency (DESA LANGA KECAMATAN MATTIRO SOMPE KAB,PINRANG)	Ir. H. Nupri Basri	Dapil IX	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
			30 orang	Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ID (ulo ulo kecamatan belopa)	Dr. H. Husmaruddin MP, SE, MM	Dapil XI		Ya	-
			50 Orang	East Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi ()	H. Yusran Sofyan, SE, M.Si	Dapil V		Ya	-
2.000801. 0001017	Pemberdayaan Kelompok Usaha Garam	Jumlah kelompok usaha garam yang diberdayakan	1 paket	Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ()	H. Ni matullah, SE, Ak	Dapil VI	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
2.000801. 0001018	Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam yang dibangun	100 unit	Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi (Kel. Pallengu (kelompok tani garam mandiri utama))	Dr. H. Alimuddin, SH, MH, M.Kn	Dapil IV	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
2.000801. 0001019	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	Jumlah alat bantu tangkap	1 Paket	Mappakasunggu Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



	Jumlah kapal yang dibangun	1 paket	North Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Galesong Utara, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III	Ya	-
	Jumlah sarana dan prasarana alat tangkap	1 paket	South Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan galesong selatan, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III	Ya	-
		1 Paket	Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi (kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III	Ya	-
		1 paket	Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III	Ya	-
		1 unit	Tongke-Tongke East Sinjai Sinjai Regency ()	A. M. Irwan Patawari, S.Si	Dapil V	Ya	-
		1 Unit	Takalar Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Takalar (4))	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III	Ya	-
		2 unit	Barrang Caddi Ujung Tanah Makassar City ()	Dr. Drs. H. Abd. Wahid Ismail, MM	Dapil I	Ya	-
		1 unit	P. Kondingareng Ujung Tanah Makassar City ()	Dr. Drs. H. Abd. Wahid Ismail, MM	Dapil I	Ya	-
		1 unit	Buloa Tallo Makassar City ()	Dr. Drs. H. Abd. Wahid Ismail, MM	Dapil I	Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1 unit	Pulau Langkai ID ()	Dr. Drs. H. Abd. Wahid Ismail, MM	Dapil I		Ya	-
			1 UNIT	Langnga Mattirosompe Pinrang Regency (DESA LANGA KECAMATAN MATTIRO SOMPE KAB,PINRANG)	Ir. H. Nupri Basri	Dapil IX		Ya	-
			1 Unit	Langnga Mattirosompe Pinrang Regency (DESA LANGA KECAMATAN MATTIRO SOMPE KAB,PINRANG)	Ir. H. Nupri Basri	Dapil IX		Ya	-
			1 Unit	Takalar Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Takalar (3))	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 unit	Makassar Makassar City South Sulawesi (Kota Makassar)	Drs. H. A. Kadir Halid	Dapil I		Ya	-
			1 Unit	Takalar Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 unit	Takalar Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Takalar (2))	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Appatanah Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kajang Bulukumba Regency South Sulawesi ()	Arum Spink, S.HI	Dapil V		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			3 Paket	Takalar Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 Paket	Gowa Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Gowa)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 Paket	Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Majapahit Selatan Kec. Pasimarannu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Batang Mata Selatan Kec. Bontomatene)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Appatanah Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Appatanah Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Bontolebang Kec. Bontoharu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Appatanah Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Appatanah Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Bontobangun Kec. Bontoharu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Harapan Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Kahu-Kahu Selatan Kec.Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Patikarya Selatan Kec.Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Majapahit Selatan Kec. Pasimarannu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Batang Mata Selatan Kec. Bontomatene)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 unit	Makassar Makassar City South Sulawesi ()	Hj. Sri Rahmi S.A.P, M.Adm.K.P	Dapil I		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1 paket	Gowa Regency South Sulawesi ID (Kabupaten Gowa)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			2 unit	Mattiرو Ujung Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency ()	H. Ni matullah, SE, Ak	Dapil VI		Ya	-
			1 unit	Bonto Manai Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency ()	Ir. H. Andi Hery Suhari Attas	Dapil VI		Ya	-
			0	North Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi (Kelurahan Mattiro Sompe)	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX		Ya	-
			0 Rp	Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ID (Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tumpabiring)	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX		Ya	-
			1 Unit	Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 Unit	South Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			2 Unit	Panaikang Sinjai Tim. Kabupaten Sinjai ()	H. Yusran Sofyan, SE, M.Si	Dapil V		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			0 unit	Pasimarannu Sinjai Tim. Kabupaten Sinjai ()	H. Yusran Sofyan, SE, M.Si	Dapil V		Ya	-
			0 unit	Sanjai Sinjai Tim. Kabupaten Sinjai ()	H. Yusran Sofyan, SE, M.Si	Dapil V		Ya	-
			1 Unit	North Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar (2))	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 unit	Belopa Luwu Regency South Sulawesi (Desa Belopa Kec. Belopa, Kab. Luwu)	Hj. Andi Jahida A. Ilyas	Dapil XI		Ya	-
			2 unit	Makassar Makassar City South Sulawesi ()	Imran Tenri Tata Amin, SE, M.Si	Dapil II		Ya	-
			1 Unit	North Galesong Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
			1 unit	Lampenai Wotu East Luwu Regency (Desa Lampenai, Kec wotu, Kab Luwu Timur)	H. Abd. Hafid Pasiangan, SE	Dapil XI		Ya	-
			1 unit	Lakawali Pantai Malili East Luwu Regency (Desa Lakawali Pantai Pantai, Kec Malili, Kab Luwu Timur)	H. Abd. Hafid Pasiangan, SE	Dapil XI		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Bontolebang Kec. Bontoharu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Bontobangun Kec. Bontoharu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Harapan Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Kahu-Kahu Selatan Kec.Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Patikarya Selatan Kec.Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Majapahit Selatan Kec. Pasimarannu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Batang Mata Selatan Kec. Bontomatene)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Appatanah Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



			2 Unit	Cari Gading Awangpone Bone Regency (Carigading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)	Drs.H. A. Mangunsidi Massarappi, M.Si	Dapil VII		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Bontolebang Kec. Bontoharu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Bontobangun Kec. Bontoharu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Harapan Kec. Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Kahu-Kahu Selatan Kec.Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
			1 Unit	Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan ID (Desa Patikarya Selatan Kec.Bontosikuyu)	Ina Nur Syamsina	Dapil IV		Ya	-
2.000801.0002	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah produksi garam rakyat							

RENCANA KERJA TAHUN 2019



2.000801. 0002005	Penyediaan dan pembesaran Induk Unggul Ikan Air Tawar beserta pakan (Instalasi Lajoa)	Jumlah calon induk yang dibesarkan	50000 ekor	West Malangke North Luwu Regency South Sulawesi (Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab.Luwu Utara)	Drs. H. Marjono	Dapil XI	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
			4 kelompok	Maros Regency South Sulawesi ID ()	Drs. Alexander Palinggi	Dapil II		Ya	-
			0	Pallantikang Pattallassang Takalar Regency (kel pallantikang kec pattallasang kab,Takalar)	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Dapil IX		Ya	-
			0	Pallantikang Pattallassang Takalar Regency (kel pallantikang kec pattallasang kab,Takalar)	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Dapil IX		Ya	-
			5 Paket	Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi (Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar)	Fachruddin Rangga SE, M.Si	Dapil III		Ya	-
2.000801. 0002010	Koordinasi Teknis Pengelolaan Perikanan Budidaya (Penerapan dan Surveilans CBIB)	Jumlah peserta koordinasi teknis pengelola Perikanan Budidaya	60 orang	Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ID ()	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
			60 orang	Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ID ()	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX		Ya	-
			60 orang	Pinrang Regency South Sulawesi ID ()	Drs. H. M. Ali Usman. M.Si	Dapil IX		Ya	-
			0	Balobalo Wotu East Luwu Regency (desa balo-balo kec,wotu,kab,luwu timur)	H. Armin Mustamin Toputiri, SH	Dapil XI		Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



2.000801. 0004	PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	% Penurunan tindakan IUU Fishing Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil							
2.000801. 0004001	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2 Kelompok 5 Kelompok	Makassar Makassar City South Sulawesi () Takalar Regency South Sulawesi ID ()	Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag	Dapil I Dapil I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya Ya	- -
2.000801. 0004013	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	6 Ha	Takalar Regency South Sulawesi ID ()	Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag	Dapil I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
2.000801. 0004017	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Bosowasi	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang	1 Ha	Tongke-Tongke Sinjai Tim. Kabupaten Sinjai ()	H. Yusran Sofyan, SE, M.Si	Dapil V	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-
2.000801. 0004018	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove	1 unit	East Bassiang South Ponrang Luwu Regency (bassiang timur kecamatan	Dr. H. Husmaruddin MP, SE, MM	Dapil XI	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ya	-

RENCANA KERJA TAHUN 2019



	Luwu Raya	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun		ponrang selatan)					
		Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang							



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Guna mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maka telah ditetapkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah dalam tugas, pemberdayaan dan pengaturan. Adapun identifikasi kebijakan nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

Tabel. 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan	DAK	
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Pesisir	DAK	
3.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	DAK	

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 Pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun 2017 juga dilakukan review RPJMD sesuai OPD baru guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya.

Berdasarkan tema ini, maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, sbb:

- Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Hilirisasi Perikanan;
- Peningkatan Sarana Prasarana dari Hulu ke Hilir ;
- Pengembangan Inovasi Teknologi produk hasil perikanan sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing;
- Pengembangan hilirisasi produk kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkarakter;
- Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2019 yaitu :

Tujuan , Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	1 (5)
1	Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup		Pertumbuhan PDRB Sulsel	8,6
1.1		Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perikanan berbasis sumberdaya alam	Pertumbuhan PDRB Perikanan	10,00
a.			Nilai hilirisasi produksi perikanan (Rp. Trilyun)	18.86
b.			Volume produksi Perikanan	4,920,204
			1. Perikanan Budidaya	4,609,988
			2. Perikanan Tangkap	366,356
c			Nilai Produksi Perikanan (Rp. Trilyun)	
			1. Perikanan Budidaya	11.12
			2. Perikanan Tangkap	7.74
d			Cakupan bina kelompok nelayan	30.18
			Nilai Tukar Nelayan	107.79
e			Nilai Tukar Pembudidaya	103.89
			Cakupan Pelabuhan perikanan yang beroperasi	52.17
f			Jumlah produksi hasil tangkapan yang dibongkar di PP	17.898
g			Nilai produksi hasil tangkapan yang dibongkar di Pelabuhan Perikanan	222,8



h			Jumlah kapal yang didaratkan dan bongkar muat di PP	15.87
i			Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	293,001.5
j			Konsumsi Ikan	53.6
k			Volume Ekspor produk KP	181,439.50
l			Nilai Ekspor Produk KP	388,769.70
m			Nilai Tukar Pengolah	104.05
n			Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial	20%
o			Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	108,628
p			Cakupan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali	20
q			produksi garam rakyat	47,504.5
r			Cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	48
s			Berkurangnya tindakan IUU fishing	9.83
t			Cakupan kasus illegal fishing yang dapat diproses melalui jalur hukum	17.34
u			Cakupan bina kelompok masyarakat terhadap pengawasan	70.83
v			Cakupan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	20

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi Sub.Sektor Perikanan terhadap PDRB Sektor Pertanian
2. Meningkatnya volume dan nilai produksi kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan
4. Meningkatnya produksi komoditas unggulan
5. Meningkatnya Konsumsi Ikan
6. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Kesepakatan dalam pencapaian target indikator terutama pada peningkatan Produksi Perikanan, Garam, Produksi Olahan dan Jumlah POKMASWAS yang dibina dalam rangka mendukung persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka Hilirisasi Perikanan diarahkan dukungan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya, Pengembangan kluster Produksi, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pengolahan dan Perluasan Pasar Produk Perikanan, Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Perbaikan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan, Pembinaan para pelaku usaha



kelautan dan perikanan serta Kemitraan pelaku dengan sumber inovasi dalam rangka peningkatan produksi

3. Penataan Sistem dan Manajemen pada Pengembangan Komoditas dan produk unggulan dari Hulu ke Hilir dengan berorientasi pasar, Pengembangan konektivitas dan infrastruktur, Pengembangan Usaha dan Investasi, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk, Pengembangan IPTEK dan SDM, Pemberdayaan masyarakat, Fasilitasi Pengembangan Wirausaha dan Fokus pada Pengarusutamaan Gender.
4. Penataan dan Peningkatan Manajemen dalam Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan.
5. Pembangunan kemaritiman diarahkan Penatakelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan infrastruktur.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2019 telah sesuai dengan RPJMD Perubahan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2019 Perubahan namun berdasarkan verifikasi rancangan Renja Tahun 2019 terhadap kesesuaian dengan RKPD maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Hilirisasi Perikanan
6. Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan
7. Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing
8. Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut

Penjelasan Program

1. Program Hilirisasi Perikanan

Program ini adalah program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya perikanan dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan hilirisasi komoditas berbasis sumberdaya. Selain itu adanya kebijakan Nasional melalui Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Perikanan seperti pengembangan fasilitas pelabuhan, pengembangan Perbenihan,



pengembangan sarpras pengawasan dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya perairan yang dialokasikan melalui dana DAK.

2. Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditi unggulan. Adapun tujuan dari program ini yaitu (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan berdasarkan konsep PUG dalam kegiatan agribisnis terutama pengembangan rumput laut dan 2) Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun komoditas unggulan yang dimaksud adalah udang, bandeng dan rumput laut serta tuna cakalang tongkol. Program ini diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan nelayan dan keluarganya melalui peningkatan pendapatan. Upaya tersebut dicapai melalui (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Usaha, (2) Peningkatan segmen usaha hulu-hilir yang terkait dan terintegrasi usahanya satu kawasan melalui pendekatan agribisnis salah satunya dengan pengembangan pelabuhan perikanan. Peningkatan produksi Perikanan Tangkap diarahkan pada komoditi yang mewakili nilai ekonomis tinggi dan peningkatan pasar yang luas .

3. Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, dan wanita nelayan (konsep PUG) melalui usaha – usaha pendampingan teknologi, manajemen usaha dan penetapan waktu tanam dan penguatan modal usaha dengan kegiatan, kemudian pengembangan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir sehingga dalam mendorong arah kebijakan tersebut . Program tersebut diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan jenis olahan hasil perikanan, usaha ini akan menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan bagi para pelaku usaha olahan hasil perikanan dan pemberdayaan masyarakat (konsep PUG) dalam diversifikasi olahan. Tujuan pemasaran akan tercapai melalui usaha (1) Peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha, (2) Peningkatan sarana olahan dan kelembagaan usaha, (3) Peningkatan informasi pasar, (4) Peningkatan ketersediaan bahan baku olahan.

4. Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut

Program tersebut diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya dan pengawasan distribusi produk perikanan dari hulu ke hilir. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan untuk pembinaan, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan sebagai pusat pertumbuhan



ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatkan pelestarian lingkungan sumberdaya melalui upaya perlindungan dan pemulihan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Tujuan yang dapat dicapai adalah meningkatkan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan .

Untuk pelaksanaan Renja tahun 2019 dukungan melalui Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional diuraikan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional :

1. **Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap**, dengan kegiatan prioritas antara lain : 1)Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), 2) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan, 3) Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan, 4) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil, 5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
2. **Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**, dengan kegiatan prioritas antara lain : 1) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, 3) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, 4) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan, 5) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya.
3. **Program Peningkatan daya saing produk perikanan**, dengan kegiatan prioritas 1) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, 2) Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 3) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, 4) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan, 5) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Peningkatan Daya Saing.
4. **Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**, dengan kegiatan prioritas : 1) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis, 2) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 3) Pendayagunaan Pesisir dan Lautan, 4) Pendayagunaan Pulau-



- Pulau Kecil, 5) Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan prioritas : 1) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 2) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan, 3) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas, 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan, 5) Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan, 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2SDKP
 6. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan prioritas : 1) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP, 2) Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP, 3) Pengembangan Data Statistik dan Informasi KP.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Terlampir matriks)



BAB V **P E N U T U P**

1.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah disusun sesuai Rancangan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013 – 2019 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2014 – 2019.

Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2013 – 2018, dari tahun ke tahun merupakan perluasan, penguatan, pengembangan dan kesinambungan dari tahapan pembangunan tahun sebelumnya. Berdasarkan Visi dan Misi yang dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya Masyarakat yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perikanan di Sulawesi Selatan sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta perikanan, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019.

Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun perikanan di Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal Penghasil devisa, Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.

4.2. Penutup

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat mendukung sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja OPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 oleh masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.